

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awalnya sebuah perusahaan membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk pendirian dan kelancaran operasional perusahaannya. Hal ini dikarenakan perusahaan membutuhkan para investor untuk membantu perusahaan dalam menyokong sumber modalnya. Sangat beresiko apabila modal awal sebuah perusahaan ditanggung oleh pemilik tunggal yang jumlahnya besar untuk ditanggung sendiri. Perusahaan akan membagi persentase modal dan kepemilikan dengan investor lainnya. Maka terjadilah sebuah struktur kepemilikan dikarenakan kepemilikan sebuah perusahaan itu tidak tunggal. Sebagai imbalannya kepada investor yang menanamkan modalnya, perusahaan akan memberikan dan membagikan keuntungannya yang disebut dengan dividen.

Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dimana para pemegang saham menerima laba tersebut sesuai dengan persentase kepemilikannya. Bagi perusahaan, dividen merupakan salah satu dalam mengukur tingkat likuiditasnya, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, dalam kondisi dilapangan investor tidak selalu menerima dividen secara konsisten, terkadang perusahaan harus menahan pembagian dividen untuk kepentingan investasi yang akan datang. Perusahaan menahan dana tersebut

demi kelancaran operasional dan mengalokasikan dananya dalam bentuk laba ditahan.

Menurut Myron Gordon (1956) dan John Lintner (1962) tentang teori *Bird In Hand* dalam kebijakan dividen menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen tunai daripada dijanjikan adanya imbal hasil atas investasi (*capital gain*) di masa yang akan datang, karena menerima dividen tunai merupakan bentuk dari kepastian yang berarti mengurangi resiko. *Capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset modal (investasi atau *real estate*) dimana harga jual melebihi harga pembelian investasi.

Corporate Governance merupakan sebuah undang undang yang berisi aturan aturan main perusahaan dan kebijakan perusahaan dimana bisa menjadi panduan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. *Corporate Governance* bisa diartikan sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkat efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Mekanisme *Corporate Governance* dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan.

Tujuan *Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, pihak-pihak tersebut adalah pihak internal (dewan komisaris, direksi, karyawan) dan pihak eksternal (investor kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lainnya). *Corporate Governance* pada sebuah

perusahaan perlu adanya pertimbangan oleh calon investor demi kelangsungan investasinya di masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini terdapat 3 indikator dalam penerapan mekanisme *good corporate governance* yaitu dewan komisaris, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. Ukuran dewan adalah jumlah dewan komisaris dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan maka akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik dan terkontrol maka akan menghasilkan laba perusahaan yang baik. Seiring dengan meningkatnya laba perusahaan maka akan meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk membagikan dividen.

Peran dewan komisaris yaitu mengawasi proses akuntansi perusahaan dan memiliki wewenang kekuasaan eksekutif dalam perusahaan. Dewan komisaris independen adalah orang-orang dari pihak eksternal yang berada dalam dewan komisaris untuk mengelola dan *handle* kegiatan operasi guna mengurangi kecurangan dalam perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat mengurangi kemungkinan adanya aktivitas kecurangan dalam pelaporan keuangan dan mengawasi kegiatan manajemen agar lebih efektif. Komisaris independen juga mempresentasikan hak-hak para pemegang saham dan menjamin hak-hak pemilik saham minoritas. Artinya semakin banyak pihak eksternal pada dewan komisaris didalam perusahaan maka semakin banyak dividen yang disebarkan oleh perusahaan.

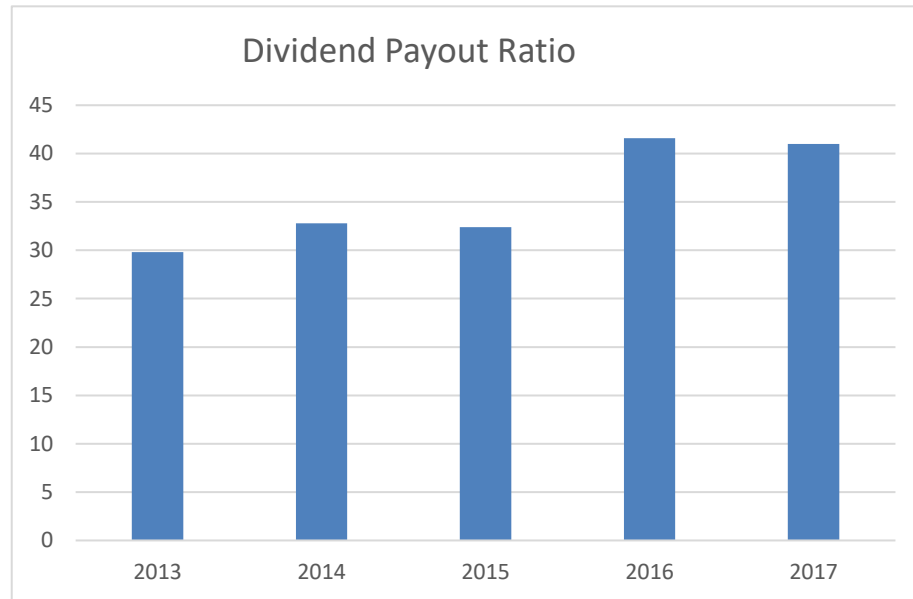
Kepemilikan institusional adalah sebuah kepemilikan yang menunjukkan persentase saham pemilik institusi atau kepemilikan oleh *blockholder*. Maksudnya kepemilikan tersebut diatas 5% namun tidak masuk kepada golongan insider (Sutanto, Marciano & Ernawati, 2017). Kepemilikan institusi dimiliki oleh lembaga non bank, seperti perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan investasi, dan yayasan swasta.

Corporate Governance dalam penelitian ini bukanlah tata kelola perusahaan secara umum melainkan hanya sebagian dari mekanisme *Corporate Governance* yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional. Menurut Abor dan Fiador (2013) variabel *leverage* dan ukuran perusahaan ditambahkan sebagai variabel kontrol untuk menambah signifikan pengaruh *Corporate Governance* terhadap kebijakan dividen.

Berdasarkan hasil dari penelitian Setiyowati & Sari (2017) mengenai pengaruh *corporate governance* yang dilakukan di Indonesia banyak menggunakan salah satu sektor perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut kurang efektif karena tidak semua emiten di dalam sektor tersebut memperhatikan dan menjalankan konsep *corporate governance* dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang spesifik pada perusahaan keuangan non perbankan yang terdiri dari subsektor asuransi, subsektor lembaga pembiayaan, subsektor perusahaan efek dan subsektor lainnya.

Dikutip dari *website* Bursa Efek Indonesia pada 2019 Bursa Efek Indonesia mencatat nilai *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan-perusahaan keuangan non perbankan ini mengalami tren naik turun atau fluktuatif. Ketidakkonsistennya sebuah perusahaan dalam membagikan dividen, disebabkan karena laba yang dihasilkan tersebut tidak stabil akibat dari fluktuasi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap harga saham perusahaan dan investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut akan melepaskan perusahaan tersebut karena investor tidak menyukai ketidakpastian dan ketidakkonsistenan (Myron Gordon 1956 dan John Lintner 1962).





Gambar 1.1

Grafik DPR

Berdasarkan pada grafik yang dicantumkan dalam gambar 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata pembayaran dividen pada perusahaan keuangan non perbankan berturut-turut pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 adalah 29.8, 32.8, 32.4, 41.6, 41 bersifat fluktuatif atau tren naik turun.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kebijakan Dividen (Studi pada perusahaan Keuangan non Perbankan yang terdaftar di BEI)”***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap kebijakan dividen dalam perusahaan keuangan non perbankan?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap kebijakan dividen dalam perusahaan keuangan non perbankan?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen dalam perusahaan keuangan non perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap kebijakan dividen dalam perusahaan keuangan non perbankan?
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kebijakan dividen dalam perusahaan keuangan non perbankan?
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen dalam perusahaan keuangan non perbankan?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi :

Sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan tentang *corporate governance* dan kebijakan dividen serta menjadi tambahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Bagi investor :

Sebagai tambahan informasi dalam proses pengambilan keputusan investasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk menilai baik atau tidaknya melakukan investasi saham di suatu perusahaan.

3. Bagi Perusahaan :

Sebagai informasi tambahan dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian ini. Adapun batasan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini juga hanya meneliti pengaruh jumlah dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen
2. Penelitian ini merupakan sampel perusahaan keuangan non perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulisan akan dibagi dalam 5 bab yang secara umum terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan ringkasan keseluruhan isi penelitian dan gambaran umum tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan dari setiap bab penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan variabel independen, hasil analisis data, dan interpretasi terhadap hasil berdasarkan alat metode analisis yang digunakan dalam penelitian serta implikasi penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran dari hasil penelitian

